

Kamis, 10 Februari 2011

## Kisruh PDAM Kota Makin Memanas

### Werry: Bayar Dong Sesuai Tagihan

PONTIANAK. Makin kompleks dan rumit saja masalah yang menyelimuti PDAM Kota Pontianak pasca pemutusan sepihak proyek pemasangan pipa HDPE, beberapa waktu lalu. Pihak pelaksana bereaksi keras terkait utang yang belum dibayar PDAM kepada pihak pelaksana.

"BPKP hanya menghitung progress bukan melakukan audit. Sebab pada waktu itu progres yang kami ajukan sebesar 92%, sedangkan PDAM menghitung sebesar 87,21%," kata Ir H Werry Syahrial, Site Manager PT Promits, pelaksana pekerjaan pipa HDPE kepada para wartawan, Rabu (9/2).

Karena dalam kontraknya di-



Werry Syahrial ketika diwawancarai para wartawan, Rabu (9/2).

mungkinkan musyawarah, maka ditempuh cara itu hingga menghasilkan kesepakatan tentang progres yang disetujui bersama. "Saya utamakan musyawarah dulu," katanya.

■ Halaman 7

## Kisruh PDAM

Dalam musyawarah itu, berdasarkan hitungan BPKP disepakati sebesar 87,021 persen. "Tapi kami meminta bayaran yang sudah disepakati. Cuma ada lagi hal-hal lain yang sudah dikerjakan dan harus dibayar. Hal ini diakui juga oleh BPKP," tegas Werry.

Werry yang juga Pemimpin Umum Harian Berkas ini mempertanyakan audit BPK dan BPKP terhadap PDAM Kota Pontianak seperti yang pernah dilontarkan Walikota H Sutarmidji SH MHum. "Mengapa hanya PDAM saja yang diaudit, sedangkan kami tidak diaudit. Saya minta diaudit. Bahkan hingga saat ini saya tidak pernah diaudit oleh BPK maupun BPKP," ujar Werry.

Dijelaskan dia, apa yang diungkapkan owner PDAM kepada publik selama ini tentang audit sebetulnya hanya hitungan BPKP untuk merinci pembayaran yang harus dilunasi PDAM. "Saya sudah konfirmasi ke BPKP dan ini sudah dipertanyakan di DPRD bahwa BPKP tidak pernah melakukan audit. Hanya menghitung," tegas dia.

Menurut dia, modal kerja setelah dipotong lain-lain sebesar Rp 7 miliar lebih, namun hanya dibayar Rp 2 miliar lebih saja. "Rp 2 miliar lebih ini hanya hitungan progress. Saya sepakat. Wajar kalau Walikota menyuruh PDAM untuk membayar. Karena itu memang yang ditagih. Tetapi, tagihan lain mana. Ini kan harus dibayar juga," ujar dia.

Mungkin, lanjut Werry, wa-

likota tidak tahu ada tagihan lain dan tidak tahu ada pemotongan serta pemutusan kontrak yang tidak benar. Semua ini juga dipotong, sehingga bukan Rp 2 miliar lebih yang dibayar, namun hanya Rp 1,4 miliar.

"Mana saya mau PDAM hanya bayar Rp 1,4 miliar. Padahal walikota Sutarmidji sudah menyuruh membayar Rp 2,4 miliar. Makanya saya laporkan ke Polda Kalbar sebab hal ini sama saja dengan penipuan bahkan penggelapan," paparnya.

Seperti diketahui, akibat persoalan ini bergulir ke Polda Kalbar yang langsung menangani dengan memanggil beberapa saksi. Masalah ini sudah masuk ranah hukum, meskipun Polda belum menetapkan tersangka. "Tetapi tampaknya sudah ada yang mau bertanggung jawab yaitu walikota," terangnya.

Kalau dihitung soal kerugian, papar Werry, sebenarnya sangat besar. "Saat saya di Dewan mengatakan PDAM tidak punya duit. Seribu rupiahpun saya terima, asalkan PDAM mau mengakui kesalahannya. Yang penting PDAM harus ngaku salah. Sebab sampai saat ini PDAM tidak mampu membuktikan kebenarannya," beber Werry.

Akibat sikap keras kepala PDAM dan Walikota ini, kata Werry, menyebabkan proyek pipanisasi yang seharusnya tuntas akhir Desember 2009 lalu terbengkalai dan putus. Padahal, tahun ini juga masyarakat sudah bisa menikmati air bersih dari proyek tersebut.

"Bahkan bisa menikmati air dari kran langsung, belum lagi jalan rusak satu tahun bisa diperbaiki. Kami pelaksana siap melaksanakan itu tapi secara sepihak kami diberhentikan bekerja. Nah, yang bikin hancur itu siapa sebenarnya," ucap mantan Ketua Inkindo Kota Pontianak ini.

Pemerintah dan PDAM jika tidak mampu membayar apa yang sudah diklaim PT Promits senilai Rp 6,9 miliar. Werry memberi saran, sebaiknya mengaku saja dan meminta maaf atas kesalahan kepada PT Promits. "Jika tidak mampu membayar, tidak masalah. Jumlah berapapun kami terima," tegasnya.

Dijelaskannya, masalah ini tidak semudah apa yang dilihat karena ada hal mendasar mengapa pembayaran tidak dilakukan. "Ini ada latar belakangnya, yaitu proyek lain miliaran rupiah, karena jika proyek ini tuntas, pastinya proyek lain senilai Rp 62 miliar otomatis ke saya. Namun, yang jelas saya mau masalah ini dituntaskan segera. Bayar dong sesuai yang saya tagih selain 87 progress itu, tagihan lain senilai Rp 6,9 miliar lebih itu, kok dipotong," katanya lagi.

Namun, kata Werry, jika walikota beralasan enggan membayar sesuai apa yang diklaim PT Promits karena takut tidak sesuai apa yang diperintahkan BPK dan BPKP, maka pihaknya siap menggugat kedua lembaga tersebut.

"BPK maupun BPKP tidak berhak untuk memerintahkan

pembayaran tersebut. Kami meminta bukti pernyataan BPK dan BPKP atas perintah pembayaran itu. Kita akan gugat BPK dan BPKP jika mereka memerintahkan hal itu. Mana surat perintahnya, karena yang berhak untuk memerintahkan pembayaran tersebut adalah konsultan proyek dan kontraktor itu sendiri," katanya.

Ketua Pengprov Lemkari Kalbar ini menyatakan siap membawa masalah ini hingga ke tingkatan hukum yang lebih tinggi. "Jika walikota tetap tidak mau membayar sesuai klaim PT Promits, dipastikan nilai kerugian yang harus dibayar pemerintah bisa lebih besar," katanya.

Sebelumnya, Walikota Pontianak Sutarmidji terkait proyek pipanisasi yang dikerjakan oleh PT Promits ini menjelaskan sesuai hasil audit BPK, memerintahkan PDAM harus membayar Rp 2,2 miliar. Selisihnya hanya masalah pajak saja. Tidak menjadi masalah.

Menurut Sutarmidji, yang menjadi permasalahan saat ini, pelaksana masih menuntut agar dibayar Rp 6,3 miliar. Sehingga tetap memerintahkan untuk bayar sesuai audit BPK dan BPKP.

"Kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Harusnya saya yang diperiksa. Karena saya yang memerintahkan. Jangan dibayar sesukanya. Karena kita tidak mau, kalau bayar Rp 6,3 miliar, ada yang melaporkan kita," tegas pria yang akrab disapa Bang Midji ini. (oen)

..... dari halaman 1